

**PERLINDUNGAN TEMPAT BERSEJARAH DAN BENDA BUDAYA  
YANG RUSAK AKIBAT PERANG YANG TERJADI DI ALEPPO  
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Whina Arga Prasetyani**

**NIM. 135010101111023**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN TEMPAT BERSEJARAH DAN BENDA BUDAYA  
YANG RUSAK AKIBAT PERANG YANG TERJADI DI ALEPPO  
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

**Whina Arga Prasetyani**

**NIM. 135010101111023**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Nurdin, SH., M.Hum.

Ikaningtyas, SH., LLM.

NIP. 195612071986011001

NIP. 198105312005012002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hanif N. Widhiyanti, SH., M.Hum.

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 197808112002122001

NIP. 196208051988021001

### IDENTITAS PENGUJI:

1. Nurdin S.H., M.Hum.
2. Ikaningtyas S.H., LL.M.
3. Dr. H. Setyo Widagdo S.H., M.H.
4. Dr. Adi Kusumaningrum S.H., M.H
5. Agis Ardiansyah S.H., LL.M.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 13 Juni 2018

Yang menyatakan,

Whina Arga Prasetyani

NIM. 135010101111023





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta tidak lupa pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, diantaranya:

1. Keluarga yang sangat penulis cintai, Mama Eka Meiyanti yang selalu percaya atas setiap keputusan yang penulis ambil, Ayah Muriyanto, Ibu Puji Chatarini yang tidak pernah bosan mengarahkan penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, Bapak Djumadi Efendi. Terima kasih atas segala peluh keringatnya, doa, nasehat baik serta bantuan materilnya untuk membuat penulis hingga ada di titik seperti ini, tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa dan tidak akan menjadi apa-apa. Semoga penulis terus bisa membuat kalian bangga atas segala pencapaiannya.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Hanif N Widhiyanti, SH., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Nurdin, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan yang diberikan selama ini untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Ibu Ikaningtyas, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang selalu memberikan kritik dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini.
6. Inna Frenina dan Ridzky Ayu, dua orang sahabat penulis sejak kecil hingga penulis seperti sekarang ini yang selalu mendukung dan selalu siap mendengarkan keluh kesah dalam menghadapi kesulitan saat menyelesaikan penulisan ini.
7. 1236 Squad yang sudah ditutup untuk selama-lamanya sejak yang punya kamar menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Thanks: Alvin Pipo, Adinda Rahmania, Abah Gilbert, Romario Pardede, Sekar Lisoi, AditorBanteng, Demy, Bang Ben, serta Aldo Tiger.
8. Mocking Jay; kak Indri, kak Dinta, Shabrina, kak Zita, kak Vini, kak Gaga, kak Ahong, kak Belan, kak Darjo, Hawin, serta semua pihak yang ada di dalamnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Teruntuk: Putri, Dea, Dinda, Audri, Pungky, Sharah, Meita, Syifa, Laras, Tamara, Dimas, Fiqi, Vidi, Mia, Nasya, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis hingga akhir studi.
10. Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Brawijaya (ALSA LC UB) rumah kedua setelah keluarga penulis sendiri, terima

kasih pengalamannya. Together will be, Connected as one, ALSA, always be one.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Dan semoga dengan penulisan ini penulis diberikan banyak pelajaran dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan penulisan ini, penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak sengaja.



Malang, Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

Whina Arga Prasetyani, Hukum Internasional, Universitas Brawijaya, Mei 2018, PERLINDUNGAN TEMPAT BERSEJARAH DAN BENDA BUDAYA YANG RUSAK AKIBAT PERANG YANG TERJADI DI ALEPPO MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, Nurdin, S.H., M.Hum., Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Perang selalu menimbulkan dampak, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung, dampak secara langsung yaitu kehancuran dan kerusakan objek materiil milik lawan. Seperti perang yang terjadi di Aleppo yang mengakibatkan kerusakan pada tempat bersejarah dan benda budaya seperti Masjid Agung Aleppo, Al Madina Souq, dan The Citadel yang merupakan warisan dunia, Hukum Humaniter Internasional telah mengatur perlindungan tempat bersejarah maupun benda budaya yang rusak. Dari penjelasan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?; (2) Bagaimanakah tanggung jawab peserta perang terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya yang terjadi di Aleppo?.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan terhadap tempat bersejarah dan benda budaya yang rusak menurut Hukum Humaniter Internasional dan pertanggung jawaban peserta perang akibat kerusakan. Jenis penelitian ini adalah normative-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yang pertama perlindungan terhadap tempat bersejarah dan benda budaya telah diatur dalam Pasal 19 (1) Konvensi Den Haag 1954, dan Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur secara khusus bahwa peserta perang harus melindungi tempat bersejarah dan benda budaya dan menghormati ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Namun pada kenyataannya masih terjadi kelalaian hingga mengakibatkan kerugian negara. Kedua, pertanggung jawaban yang dapat dilakukan, telah termuat dalam Pasal 38 Protokol Tambahan II 1999 Konvensi Den Haag 1954, dengan cara melakukan reparasi dan pertanggung jawaban secara pidana individual. Yang diharapkan menjadi pemahaman tersendiri oleh peserta perang.

## SUMMARY

Whina Arga Prasetyani, International Law, University of Brawijaya, May 2018, PROTECTION OF HISTORICAL PLACES AND BROKEN CULTURAL OBJECTS DUE TO WAR IN ALEPPO IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Nurdin, S.H., M. Hum., Ikaningtyas, S.H., LL.M.

War always cause an impact, either direct or indirect impact, the impact directly, namely the destruction of and damage to objects material belonging to the opponent. Like the war that occurred in Aleppo which resulted in damage to historic sites and cultural objects such as the great mosque of Aleppo, Al Madina, and The Citadel which is a world heritage, the law has set the International protection Humaniter historical places as well as cultural objects that are damaged. From that explanation, the author raised the two formula problem namely, (1) how is the form of protection against destruction of historic sites and cultural objects based on International Law Humaniter?; (2) how is the responsibility of the participants of the war against the destruction of historic sites and cultural objects that occur in the Aleppo?. The purpose of this research was to know and analyse the forms of protection of historic sites and cultural objects are broken according to the law of international responsibility Humaniter participants due to war damage. This type of research is the normative-juridical approach to legislation (statute approach), the approach of the case (case approach). From the results of this research can be drawn the conclusion, the first protection of historic sites and cultural objects have been provided for in article 19 (1) the Hague Convention of 1954, and article 8 of the Hague Convention 1954 which regulates in particular that the participants of war need to protect historic places and cultures and respecting the existing provisions in the Convention. But in fact still happening omission resulted in losses to the State. Secondly, the liability that can be done, has been contained in additional Protocol II, Article 38 1999 the Hague Convention of 1954, with how to perform repair and liability in criminal individual. That is expected to be its own understanding by participants of the war.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	7
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian.....	7
Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. Tanggung Jawab Negara.....	11
3. Tempat Bersejarah.....	14
4. Hukum Humaniter Internasional.....	16
5. Instrumen Hukum Humaniter Internasional.....	26
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	32
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual.....	33
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Rusaknya Tempat Bersejarah dan Benda Budaya Berdasar Hukum Humaniter Internasional.....	35
A. Sejarah Konflik Aleppo.....	35
B. Peraturan Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer.....	38

C. Perlindungan Obyek Bersejarah.....	41
2. Tanggung Jawab Peserta Perang Terhadap Rusaknya Tempat Bersejarah dan Benda Budaya di Aleppo .....	48
A. Kewajiban Negara dalam Melindungi Tempat Bersejarah...	49
B. Peserta Perang Negara dan Peserta Perang Bukan Negara ( <i>Armed Conflict and Armed Conflict Non-State</i> ).....	58
C. Tanggung Jawab Peserta Perang.....	59

## **BAB 5 PENUTUP**

Kesimpulan.....	68
Saran.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perang dalam suatu negara maupun antar negara akan selalu menimbulkan efek kehancuran yang tidak terelakkan dan berdampak langsung maupun tidak langsung bagi stabilitas suatu negara. Adapun contoh yang berdampak langsung adalah adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kerusakan dan kehancuran objek material milik lawan tersebut dengan mengambil alih properti. Hal tersebut pun menjadi suatu kerugian di masa perang yang tidak dapat dihindari. Pada masa awal kekaisaran Romawi, pelaksanaan perang begitu tidak terkendali karena tidak terdapat banyak peraturan mengenai aturan perang itu sendiri. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan berubah dan muncul pedoman berperilaku yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut.

Kodifikasi universal dari peraturan-peraturan dalam konflik bersenjata dimulai pada abad ke-19. Peraturan-peraturan yang terhimpun itu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan militer dari negara-negara yang ikut berperang.<sup>1</sup> Kumpulan peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari bidang hukum konflik

---

<sup>1</sup> International Committee of Red Cross, *“What is International Humanitarian Law?”*(*International Committee of Red Cross Legal Fact Sheet*, 31 Juli 2004), hlm. 1.

bersenjata (*law of armed conflict*) atau sekarang lebih di kenal dengan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*).<sup>2</sup>

*International Committee of Red Cross* (ICRC), sebuah organisasi internasional yang memberikan bantuan humaniter kepada orang-orang yang terkena dampak perang,<sup>3</sup> menyatakan sebagai berikut:

*“International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare.”*

Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang manusiawi, untuk membatasi akibat dari konflik bersenjata. Aturan tersebut melindungi manusia yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi sarana dan metode berperang. Perumusan dari pendapat tersebut dimaksudkan bahwa hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang diakibatkan oleh konflik bersenjata (*armed conflict*), atau sebagaimana sering disebut untuk “memanusiakan” konflik bersenjata, dengan memberikan perlindungan kepada para pihak yang langsung terpengaruh oleh konflik tersebut. Meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, berjalannya konflik bersenjata tetap berarti.

Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada orang perorangan, namun juga berdampak pada terjadinya kerusakan terhadap atau hilangnya properti. Hal itu merupakan imbas yang tidak dapat terelakkan saat terjadinya konflik bersenjata. Adapun yang termasuk dalam kategori properti tersebut adalah

---

<sup>2</sup> Robert Kolb dan Richard Hyde, *An Introduction to the International Armed Conflict Law*, (Portland: Hart Publishing, 2008), hlm. 15.

<sup>3</sup> ICRC “*About the International Committee of The Red Cross*” terbentuk Tahun 1863, karena mandat dari *Geneva Convention 1949*



tempat bersejarah maupun tempat beribadah. Berbagai contoh yang telah terjadi akibat perang seperti perusakan dan penjarahan benda budaya. Motif perusakan terhadap properti pun bermacam-macam, salah satunya yakni perusakan atau penjarahan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan trofi perang, sebagai tanda penaklukan atau sekedar untuk menumpuk kekayaan.<sup>4</sup> Atas dasar alasan tersebut maka hukum humaniter tidak hanya memberikan perlindungan terhadap para pihak yang ada dalam suatu konflik bersenjata, akan tetapi juga melindungi benda budaya dan tempat bersejarah saat terjadi perang.

Dalam perkembangannya, demi mengurangi jumlah tempat bersejarah yang menjadi sasaran perang, konferensi umum UNESCO yang dilaksanakan pada tahun 1949 memutuskan untuk memulai proyek dengan membentuk ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya saat terjadi perang. Namun pada kenyataannya konferensi UNESCO tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan perang. Sehingga beberapa tahun kemudian lahirlah sebuah konvensi yang bernama Konvensi Den Haag 1954, konvensi ini mengatur tentang perlindungan terhadap benda budaya saat terjadi perang. Ketentuan dalam Konvensi tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi benda-benda budaya yang ada di daerah konflik bersenjata, agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk bagi benda-benda yang mempunyai nilai budaya.

---

<sup>4</sup> Patrick J. Boylan, *"The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict"*, (London: Routledge 2002), hlm. 43-44.

Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur tentang perlindungan benda budaya saat terjadinya konflik bersenjata mempunyai ketentuan-ketentuan yang tepat untuk melindungi benda mana saja yang harus dijaga saat perang namun kurangnya tanggung jawab dari para pihak yang berkonflik untuk memperhatikan benda budaya di wilayah yang mereka duduki membuat benda budaya terbengkalai dan bahkan mendapat perlakuan yang semena-mena dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2011, beberapa situs peninggalan sejarah maupun tempat religi di Aleppo Suriah hancur karena adanya perang.

Aleppo adalah salah satu kota terbesar di wilayah Suriah. Kota tersebut memiliki banyak peninggalan sejarah yang signifikan dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia.<sup>5</sup> Namun pada tahun 2011 terjadi konflik bersenjata di Suriah, yang mengakibatkan sejumlah bangunan bersejarah dan benda budaya Aleppo mengalami kerusakan parah ditambah terjadinya pertempuran Suriah untuk menyerang ISIS, yang merupakan *Belligerent* dan akhirnya menduduki daerah tersebut pada akhir Mei 2015. Hal ini didukung dengan adanya sejumlah berita internasional menyebutkan bahwa perang saudara yang terjadi di Suriah telah menghancurkan sejumlah peninggalan sejarah disana.<sup>6</sup>

Konflik tersebut selain menimbulkan korban jiwa juga menimbulkan kerugian materiil, untuk itu masyarakat setempat berjuang melindungi banyaknya kerugian materiil antara lain yaitu warisan tempat bersejarah dan

---

<sup>5</sup> Oscar White Muscarella, *Archaeology, Artifacts and Antiquities of the Ancient Near East*, Leiden: Brill, 2013, hlm 32

<sup>6</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

benda budaya yang ada disana. Beberapa data tempat bersejarah dan benda budaya yang hancur adalah, Masjid Agung Aleppo, Al Madina Souq, dan The Citadel of Aleppo yang sejak 1986 telah tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO dalam Ancient City of Aleppo.<sup>7</sup> Suriah yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya saat Terjadi Perang telah menerbitkan sejumlah peraturan mengenai perlindungan tempat bersejarah dan benda budaya, diantaranya adanya Menteri Kebudayaan di Suriah yang melalui Direktorat Jenderal Peninggalan Kuno dan Museum yang berkedudukan di Damaskus untuk bertugas mengurus tempat bersejarah dan benda budaya.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas terlihat jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi Den Haag 1954 secara tegas mengatur kewajiban para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi benda budaya, tidak hanya Konvensi Den Haag 1954 saja yang mengatur secara tegas namun diatur pula dalam Protokol Tambahan dan aturan UNESCO. Akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum tempat bersejarah dan benda budaya yang hancur akibat perang hingga saat ini menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka bagaimana bentuk perlindungan dan tanggung jawab tempat bersejarah di Aleppo menurut Hukum Humaniter

---

<sup>7</sup> <https://m.kiblat.net/2016/05/02/10-situs-bersejarah-suriah-yang-hancur-akibat-konflik> diakses pada tanggal 27 Desember 2017

<sup>8</sup> *Report the implementation of the 1954 Convention for Protection Cultural Pproperty in The Event Armed Conflict and its Two Protocols*, hlm 45

Internasional. Untuk itu dari penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TEMPAT BERSEJARAH DAN BENDA BUDAYA YANG RUSAK AKIBAT PERANG YANG TERJADI DI ALEPPO MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.”**



Tabel 1.1

**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun Penelitian	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2012	Sasha Izni Shadrina  (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia)	Perlindungan Terhadap Benda Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional: Penerapannya oleh <i>International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia</i> Dalam Kasus Dubrovnik	1. Bagaimanakah sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata?  2. Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur perihal perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata?  3. Bagaimanakah penerapan ketentuan dalam hukum internasional terkait perlindungan terhadap benda budaya oleh ICTY dalam kasus Dubrovnik?	Pada skripsi lebih menerapkan bagaimana perlindungan terhadap benda budaya oleh ICTY, sedangkan penulis lebih membahas tentang bentuk pertanggung jawaban dari para peserta perang atas rusaknya benda bersejarah yang ada di Aleppo.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah tanggung jawab peserta perang terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya yang terjadi di Aleppo?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab peserta perang terhadap rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya yang terjadi di Aleppo.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di dalam bidang Hukum Internasional, khususnya pada bidang Hukum Humaniter Internasional terkait dengan perlindungan benda bersejarah yang rusak akibat perang.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulisan yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat
- 3) Penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang selanjutnya dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistematika skripsi ini.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas lebih lanjut pengertian dan istilah hukum serta pengaturan terkait benda budaya dan tempat bersejarah yang hancur saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional. Dalam menyusun bab ini, penulis mencari dan menganalisis berbagai sumber bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel hukum, jurnal hukum, situs internet. Manfaat dari bab ini adalah membantu dan mempermudah penulis untuk menggunakan pisau analisis yang tepat terhadap hasil penelitiannya kedalam pembahasan permasalahan dari penelitian yang akan di bahas.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait dengan metode-metode ilmiah yang digunakan agar mendapat informasi yang valid, tujuannya adalah dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saat tertentu dapat digunakan sebagai media untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Komponen dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.



#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang menjadi pokok bahasan dari suatu penelitian.

Bab Hasil dan Pembahasan berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan topik permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil dan pembahasan ini disusun secara sistematis dan praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan gagasan dan ide penulisan penelitian ini yang dinyatakan secara keseluruhan yang didasarkan pada rumusan masalah dan pembahasannya. Kesimpulan tersebut akan mempermudah para pembaca untuk mengetahui secara ringkas dan jelas apa yang menjadi inti dari permasalahan yang di bahas oleh penulis. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang selanjutnya dapat digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban terhadap masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terhadap tempat bersejarah dalam masa konflik bersenjata telah diatur dalam instrumen khusus hukum internasional, tepatnya hukum humaniter internasional. Menurut *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* Den Haag Tahun 1954, yang mempunyai prinsip bahwa benda-benda budaya seperti rumah ibadah, museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi terhadap serangan.

Dimasa damai, setiap negara harus mempersiapkan perlindungan benda budaya di wilayahnya dari akibat pertikaian bersenjata. Untuk itu, obyek budaya harus dilindungi. Disamping itu, benda budaya dapat juga dilindungi secara khusus, dengan mencatat dalam “daftar internasional obyek budaya di bawah perlindungan khusus” yang berada di bawah pertanggung jawaban UNESCO.<sup>9</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Negara

##### 1) Hakikat Pertanggung Jawaban Negara

Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan pemulihan atas terjadinya kerugian yang mungkin ditimbulkan atas terjadinya kerusakan

---

<sup>9</sup> Anne Sophie Gindorz, **Sejarah dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional**, PSHH – Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1996, hlm. 16

oleh negara tersebut ke negara lain.<sup>10</sup> Meskipun suatu negara itu telah berdaulat, namun pada hakikatnya kedaulatan tersebut tidaklah berarti bahwa negara tersebut bebas dari tanggung jawab. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap kedaulatan negara yang terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu suatu negara dapat diminta pertanggung jawaban untuk tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kedaulatannya.<sup>11</sup>

Yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara lain wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak tersebut, dengan kata lain negara tersebut mampu mempertanggung jawabkannya.<sup>12</sup> Suatu negara dapat bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain.<sup>13</sup>

Menurut Shaw, karakteristik kerap kali dinyatakan dalam praktek pengadilan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Adapun yang menjadi karakteristik lahirnya tanggung jawab negara bergantung pada:

---

<sup>10</sup> F. Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 105

<sup>11</sup> Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 203

<sup>12</sup> Hingorani, **Modern International Law**, 2nded., 1984, hlm. 241

<sup>13</sup> D. J. Harris, **Cases and Materials on International Law**, London: Sweet and Maxwell, 5th. Ed. 1998, hlm. 484

- a) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional;
- c) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

## 2) Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing dan Property Milik Asing

Negara memiliki hak kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Dalam praktek, perlakuan buruk negara-negara (*ill treatment*) tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Perlakuan buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pengingkaran keadilan (*denial justice*);
- b) Pengambilan harta benda pihak asing secara tidak sah;
- c) Kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing;
- d) Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara;

## 3) Pertanggung Jawaban Negara dan Teori “*Fault*”

Secara harfiah “*fault*” berarti kesalahan. Dalam hal ini suatu perbuatan dikatakan “*fault*” apabila perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan itikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktik hukum internasional pada saat ini tidak mensyaratkan adanya “*fault*” pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggung jawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan. Pertanggung jawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya “*fault*” itu disebut “*strict liability*”.<sup>14</sup>

### 3. Tempat Bersejarah

Menurut UNESCO dalam *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage (Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972)*, dinyatakan dalam pasal 1, yang dianggap warisan budaya adalah:

- a) Monumen (*monuments*), yaitu berupa karya arsitektur, karya patung monumental dan lukisan, elemen atau struktur yang bersifat akeologis, prasasti, gua tempat tinggal dan kombinasi fitur, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu;
- b) Kelompok bangunan (*group of buildings*) yaitu kelompok yang terpisah atau bangunan terhubung yang karena arsitektur mereka,

---

<sup>14</sup> Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar: edisi kedua**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 111

homogenitas mereka atau tempat mereka di lanskap, adalah dari nilai-nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu;

- c) Situs (*sites*) yaitu karya manusia atau karya gabungan alam dan manusia, dan daerah termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sejarah, estetika, titik etnologis atau antropologis pandang.

Kemudian definisi tempat bersejarah yang diuraikan dalam Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO tersebut lebih di perjelas dalam Konvensi Den Haag 1954 yang dinyatakan dalam pasal 1.

*“For the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership: (a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular: archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of arts; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above”<sup>15</sup>*

Untuk kegunaan Konvensi ini, istilah benda budaya meliputi, tanpa mempedulikan asal atau kepemilikannya: (a) benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat keagamaan maupun sekuler; situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan, mempunyai kepentingan sejarah atau artistik;

---

<sup>15</sup> Konvensi Den Haag 1954, pasal 1 (a)

karya seni; manuskrip, buku dan obyek lain dengan kepentingan artistik, bersejarah atau arkeologis; juga koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku atau arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan diatas.

Dari pernyataan diatas, pasal berikutnya menjelaskan ruang lingkup dari perlindungan dari benda budaya tersebut, yang berbunyi:

*“For the purposes of the present Convention, the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect of such property”<sup>16</sup>*

Untuk tujuan konvensi ini, perlindungan benda budaya terdiri dari pengamanan dan penghormatan terhadap properti tersebut. Dari kutipan diatas bahwa definisi perlindungan berdasarkan Konvensi Den Haag 1954 mencakup dua aspek, yaitu aspek pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya. Pengamanan yang disebut meliputi semua tindakan yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap benda budaya akibat konflik bersenjata. Di sisi lain, penghormatan merupakan kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang, seperti menyebabkan terancamnya benda budaya dalam suatu konflik bersenjata atau menyebabkan kerusakan terhadap benda budaya.

---

<sup>16</sup> Ibid, pasal 2



#### 4. Hukum Humaniter Internasional

##### 1) Definisi Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. umumnya aturan-aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral, dan agama.

Pada abad ke 18 Jacques Rosseau dalam bukunya *The Social Contract* mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi Hukum Humaniter Internasional. Pada abad ke 19 landasan moral oleh Henry Dunant, yang merupakan initiator organisasi palang merah, kemudian berhasil menyusun Konvensi Jenewa 1864.

Konvensi Jenewa 1864, merupakan Konvensi bagi perbaikan keadaan tentara yang terluka di medan perang, Konvensi ini menjadi perintis Konvensi-Konvensi Jenewa berikutnya yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Pada masa selanjutnya kemudian berkembang traktat-traktat yang ditandatangani negara-negara. Misalnya Hukum Den Haag 1899 dan 1907 yang merupakan serangkaian, Konvensi dan Deklarasi yang mengatur tentang alat dan cara berperang. Kemudian Konvensi Jenewa dilengkapi juga dengan Protokol Tambahan 1977.



Prinsip atau asas Pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter internasional.<sup>17</sup> Prinsip ini membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang dalam dua golongan: *Combatant* dan *Civilian*. Hukum humaniter internasional juga membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Jika pertikaian bersenjata melibatkan dua negara atau lebih maka yang disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau *international armed conflict*. Pengertian *international armed conflict* ini kemudian diperluas oleh Protokol I 1977 yang juga mengkategorikan *CAR conflict* sebagai *international armed conflict*.

Pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau biasa disebut *non-international armed conflict*. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977.

Dari ketentuan diatas, salah satu aspek terpenting dalam hukum humaniter adalah mengenai mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Mekanisme ini diatur dalam Konvensi Jenewa yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum nasional. Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag)

---

<sup>17</sup> Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63.

<sup>18</sup> Haryotaram, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm 1

- b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa)

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:

- a) Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- b) Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 yaitu:
  1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.
  2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

Berdasarkan uraian diatas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Dengan adanya perkembangan baru, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi menjadi Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata.

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir tahun 70-an ditansai dengan diadakannya *Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed*

*Conflict*. Sebagai bidang baru dalam hukum humaniter internasional, maka terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter dari para ahli, dengan ruang lingkupnya, seperti contohnya:

“bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur peran itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”<sup>19</sup>

Selain Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat, ada pula Jean Pictet yang merumuskan hukum humaniter internasional dengan

*“international humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, wheter written and customary, ensuring respect for individual and his well being”*<sup>20</sup>

Hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah ketentuan hukum konseptual, baik tertulis maupun adat, yang menjamin kehormatan harkat dan martabat setiap orang. Dengan mencermati pengertian dan/atau definisi yang disebutkan diatas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan aliran sempit.

Seperti Jean pictet misalnya, yang mengartikan hukum humaniter internasional dalam arti yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup Hukum Jenewa, Hukum Den Haag dan Hak Asas Manusia.

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 1980, hlm 5

<sup>20</sup> Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, dalam Haryotaman, op.cit, hlm 5

## 2) Asas-asas Hukum Humaniter

Asas yang dikenal dalam hukum humaniter internasional:

### a. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

### b. Asas Perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

### c. Asas Kesatria (*Chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat adalah dilarang.

## 3) Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan dimanaa aturan-aturan hukum humaniter itu timbul, dan lebih sulit lagi untuk menyebutkan pencetus hukum humaniter itu sendiri.<sup>21</sup> Sekalipun dalam bentuknya yang sekarang relatif baru, hukum humaniter

---

<sup>21</sup> Hans Peter Gaser, *Internatinal Humanitarian Law, An Introduction*, Paul Haupt Publisher, Bernestuttgart-Vienna, 1993, hlm 6

internasional atau hukum sengketa bersenjata, atau hukum perang, memiliki sejarah yang panjang.<sup>22</sup>

Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejawaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang.<sup>23</sup>

Upaya-upaya tersebut dapat kita bagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter berikut ini:

a. Zaman Kuno

Dalam masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.<sup>24</sup>

Dalam berbagai peradaban besar selama tahun 1500 SM upaya-upaya seperti itu berjalan terus. Hal ini dikemukakan oleh Pictet, antara lain sebagai berikut:

- a) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga teroganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan

---

<sup>22</sup> Frits Kalshoven, *Constraint on the Waging of War*, ICRC, 1991, hlm 7

<sup>23</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Publisher, 1985, hlm 6

<sup>24</sup> Frits Kalshoven, *loc.cit*; lihat juga Jean Pictet, *Op.cit*, hlm 6

perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.

- b) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam “*Seven Works of True Mercy*”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit, dan menguburkan yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan, “anda juga harus memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang tamu, bahkan musuh pun tak boleh diganggu.
- c) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani pernyataan perang dan traktat. Para penduduk menyerah, yang berasal dari kota, tidak diganggu. Kota-kota di mana para penduduknya melakukan perlawanan, akan ditindak tegas. Namun hal ini merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak dan penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Kemurahan hati mereka berbeda dengan bangsa Assiria yang menang, datang dengan kekejaman.

Di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan Mahabrata dan Undang-undang Manu, para satria dilarang membunuh musuh yang cacat, yang menyerah; yang luka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati

atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan hak milik musuh dan syarat-syarat bagi penahanan para tawanan perang telah diatur, dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat ditemukan beberapa kebiasaan dan hukum perang yang diberlakukan pada periode pra-sejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Praktek dari kebiasaan dan hukum perang yang dilakukan antara lain tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan perang serta larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan, dan juga tentang pengakhiran perang.

b. Zaman Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*, ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur’an surah al Baqarah: 190,191, al Anfal: 39, at Taubah: 5, al Haj: 39,<sup>25</sup> yang memandang perang sebagai sasaran pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkaran adapun prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

---

<sup>25</sup> Masjhur Effendi, Moh Ridwan, Muslich Subandi, **Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional**, IKIP Malang, 1995, hlm 16



c. Zaman Modern

Kemajuan yang menentukan terjadi mulai abad ke-18, dan setelah berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun 1850 sampai pecahnya Perang Dunia I. Praktek-praktek negara kemudian menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang (*jus in bello*). Salah satu tonggak terpenting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864.

Konvensi tersebut mengatur tentang perbaikan keadaan tentara yang luka di medan perang darat. Konvensi tersebut dipandang sebagai konvensi yang mengawali konvensi-konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkodifikasikan ketentuan perang di darat.<sup>26</sup> Berdasarkan konvensi ini maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Konvensi memperkenalkan Palang Merah diatas dasar putih sebagai tanda pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan.<sup>27</sup> Tanda tersebut merupakan lambang dari *international Committee of the Red Cross*.

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter internasional,

---

<sup>26</sup> Haryotaram, op.cit, hlm 16

<sup>27</sup> Jean Pictet, op.cit, hlm 29



dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850.

## 5. Instrumen Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada definisi diatas, maka telah diketahui bahwa hukum humaniter internasional terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama, selain konvensi-konvensi lain yang telah disebutkan terdahulu.

### a. Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Membicarakan Hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan 1907.

### b. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil konferensi Perdamaian di Den Haag, konferensi yang di mulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung selama 2 bulan menghasilkan

tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Tiga konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konvensi tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi tentang Adaptasi Azas-Azas Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut.

c. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini adalah merupakan hasil Konferensi Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 terdiri dari beberapa konvensi yang penting. Diantaranya adalah:

1. Konvensi Den Haag 1907 Mengenai cara memulai permusuhan.
2. Konvensi Den Haag 1907 mengenai Hukum dan kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi Den Haag 1907 mengenai Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat.
4. Konvensi Den Haag 1907 mengenai Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di Laut.

d. Hukum Jenewa

Bahwa Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua aturan dalam hukum humaniter, sebagaimana dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa, Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan

korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;*
2. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of armed forces at Sea;*
3. *Geneva Convention relative to the treatment of Prisoners of Wars;*
4. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (protocol I); dan*
2. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Non international Armed Conflict (protocol II).*

Protokol I maupun II diatas merupakan tambahan dari konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian

terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara perang.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam setiap penelitian memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala tersebut.<sup>28</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan asas-asas atau teori-teori hukum dalam hukum positif.<sup>29</sup> Penelitian yuridis normatif yang dimaksud adalah mengkaji masalah hukum dalam hukum tertulis yang mengatur tentang peran Konvensi Den Haag 1954, Konvensi Jenewa 1949, Statuta *International Tribunal For The Former of Yugoslavia* (ICTY), dan Resolusi PBB dalam menyelesaikan kasus rusaknya benda budaya dan tempat bersejarah saat terjadi perang di Aleppo. Penelitian hukum ini digunakan karena fungsinya sama dengan kajian penelitian ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan koherensi, yaitu kaidah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: Universitas Indonesia 1984), hlm 9

<sup>29</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295

yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian *yuridis normative* ini penulis menggunakan beberapa macam metode pendekatan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pendekatan Peraturan Hukum Tertulis (*statute approach*), dipergunakan karena menurut penulis peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional merupakan titik fokus utama dari penelitian *yuridis normatif*. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisa atau menelaah dari Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada saat Terjadi Perang, Konvensi Jenewa 1949 tentang Pelindungan Penduduk Sipil dalam Masa Perang, Statuta *International Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY), Resolusi Dewan Keamanan PBB.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus, dengan cara menelaah beberapa kasus yang mempunyai isu hukum yang sedang dihadapi, maupun yang sudah memperoleh putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus, penulis menelaah kasus yang menyangkut tentang rusaknya tempat bersejarah dan benda budaya pada saat terjadi perang.

### C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang dibuat ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer:

1. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Terhadap Benda Budaya Saat Terjadi Perang
2. Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Waktu Perang
3. Protokol II 1999 Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Saat Terjadi Perang
4. Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional
5. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional
6. Statuta *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY)



- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, karya ilmiah, artikel atau jurnal hukum, doktrin atau pendapat para ahli, serta penelusuran informasi melalui internet.
- c) Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup studi kepustakaan dan juga studi dokumentasi.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam penelitian normatif, penelusuran bahan hukum primer, sekunder, atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, maupun bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Konvensi atau perjanjian internasional, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang penulis telusuri pada:

1. Perpustakaan Umum Kota Malang
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Buku-buku, literatur, dan jurnal hukum milik pribadi penulis.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian kali ini menggunakan interpretasi atau penafsiran. Penafsiran atas suatu peraturan hukum yang

memegang peranan penting dalam ilmu hukum, oleh karena melalui penafsiran inilah makna yang terkandung di dalamnya maupun maksud tujuannya akan dapat diketahui.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara, yang didalamnya mengatur perlindungan hukum bagi warga negara maupun sesuatu yang dianggap penting untuk dilindungi bagi suatu negara, dan akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi Negara tersebut.

### **2. Tanggung Jawab Negara**

Tanggung jawab negara itu sendiri berarti hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap obyek bersejarah suatu negara yang harus dihormati dan timbul pertanggung jawaban ketika negara lain menderita kerugian atas tindakan perusakan.

### **3. Tempat Bersejarah**

Tempat Bersejarah adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap Negara.

### **4. Benda Budaya**

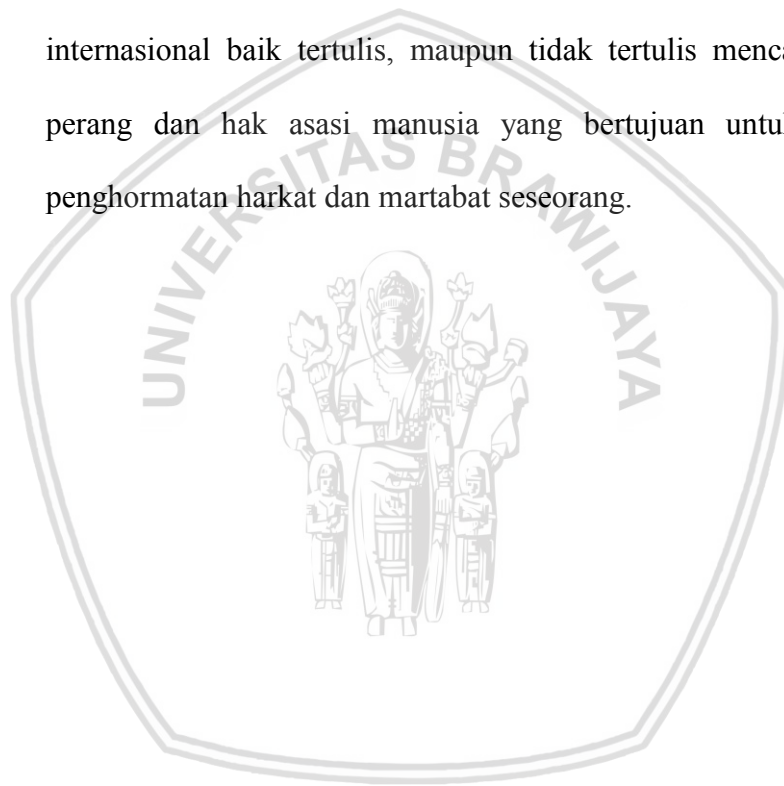
---

<sup>30</sup> I Wayan Parthiana, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 306

Benda Budaya adalah sebagian peninggalan bersejarah, sebagai contohnya monumen, artefak, benda seni lainnya yang memiliki arti penting untuk suatu negaradan harus di hormati keberadaannya untuk stabilitas suatu negara.

#### 5. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis, maupun tidak tertulis mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan harkat dan martabat seseorang.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Rusaknya Tempat Bersejarah dan Benda Budaya Berdasar Hukum Humaniter Internasional

##### A. Sejarah Konflik Aleppo

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, yang tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik biasanya terjadi ketika tujuan dari masyarakat tidak sejalan. Konflik lahir karena beberapa hubungan sosial antarpribadi, tingkat kelompok, organisasi, ekonomi dan kekuasaan. Oleh sebab itu mengapa konflik seringkali tidak mudah untuk di selesaikan. Untuk mengetahui sumber konflik Suriah kita perlu mengetahui kronologi konfliknya, konflik Suriah dapat diruntut dari peristiwa protes sekelompok pelajar yang saat itu mengkritik rezim yang sedang berlangsung, dengan menyuarakannya melalui tembok-tembok kota.<sup>31</sup>

Kepolisian pemerintah Suriah menangkap para pelajar tersebut kemudian memenjarakan mereka selama satu bulan. Selama dalam masa penahanan, para pelajar mengalami penyiksaan dan hal tersebut diketahui setelah mereka dibebaskan.<sup>32</sup> Mengetahui penyiksaan yang dilakukan polisi tersebut, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011 masyarakat kemudian melakukan aksi

---

<sup>31</sup> Dina Y Sulaeman, **Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional**, IMan, 2013, hlm. 100

<sup>32</sup> A Muchaddam Fahham dan A. M Kartaatmaja, **Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya**, dalam Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014, hlm 40

demonstrasi. Demonstrasi kedua terjadi pada tanggal 23 Maret 2011, menyusul insiden tersebut Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghapus pembatasan partai politik, akan tetapi usulan tersebut diabaikan oleh para tokoh oposisi Suriah.

Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh oposisi Suriah mendapat perlawanan dari rakyat Suriah pro rezim tersebut, perlawanan tersebut akhirnya menimbulkan protes besar-besaran yang terjadi di Damaskus. Tepatnya pada Juli 2012 terjadilah sengketa bersenjata non internasional akibat kontra rezim terjadi. Akibat dari protes besar-besaran tersebut menelan banyak korban, tidak hanya korban akan tetapi juga ribuan rumah, infrastruktur dan sarana publik hancur, dimana didalamnya termasuk Ancient City of Aleppo yang telah tercatat dalam Unesco, yaitu Masjid Agung Aleppo, Al Madina Souq, dan The Citadel. Peninggalan sejarah tersebut hancur akibat perang yang terjadi akibat protes rezim yang berkuasa. Oleh karena terjadi protes yang menimbulkan banyak korban tersebut, akhirnya rezim Bashar al-Assad menyatakan mundur dan tidak menjabat sebagai presiden kembali.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid,

### 1.A.1 Dokumentasi Tempat Bersejarah

Berikut merupakan dokumentasi beberapa benda budaya, tempat bersejarah dan beberapa sarana publik yang hancur akibat perang . Data tempat bersejarah dan benda budaya yang hancur adalah

Gambar 4.1 Masjid Agung Aleppo



Sumber <https://whc.unesco.org/en/list/21>

Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di kota Alepo, letaknya di distrik al-Jalloum dan dibangun pada awal abad ke-8. Akan tetapi masjid ini rusak, bahkan masjid yang telah tercatat dalam daftar warisan dunia Unesco tersebut hancur karena pengeboman oleh demonstran kontra rezim Bashar al Assad yang pada waktu itu menduduki pemerintahan.

Gambar 4.2 Al Madina Souq

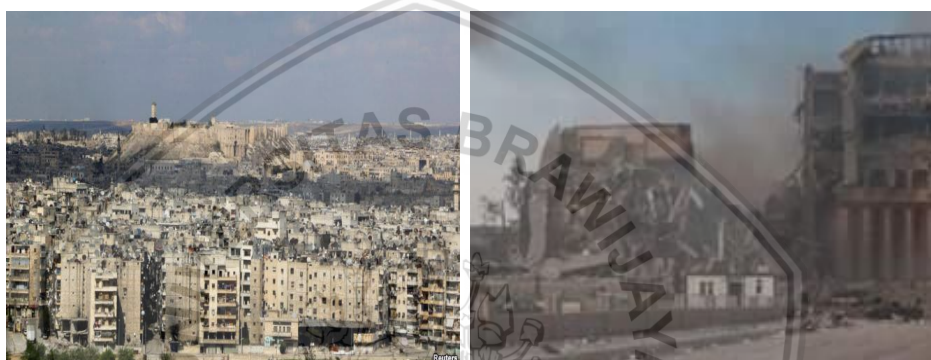


Sumber <https://whc.unesco.org/en/list/21>



Salah satu Warisan dunia UNESCO yang telah tercatat dalam Ancient City of Aleppo sejak abad ke 17 tersebut merupakan pasar bersejarah terbesar dan tertutup di dunia, yang membentang sekitar 13 hektar. Akan tetapi kompleks tersebut hancur dan hangus sebagai akibat konflik antara pejuang pro rezim melawan angkatan bersenjata rezim Assad.

Gambar 4.3 The Citadel



Sumber <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140>

The Citadel merupakan benteng tertua dan terbesar di dunia dengan bangunan istana di dalamnya yang pernah didiami oleh orang-orang Yunani. Namun citadel telah mengalami kerusakan yang amat parah pada tahun 2012 akibat serangan bom yang berlangsung di Aleppo. Bahkan gerbang luar benteng tersebut juga mengalami kerusakan parah. Sejumlah bangunan bersejarah yang rusak akibat konflik yang terjadi Aleppo tersebut merupakan warisan dunia yang sudah tercatat dalam daftar Ancient City of Aleppo dalam UNESCO, oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban dari negara tersebut maupun peserta perang untuk menghormati bangunan tersebut.



## **B. Peraturan Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer** *(civilian objects and military objectives)*

Pada awal terciptanya hukum humaniter memang lebih banyak memberikan perlindungan terhadap kombatan serta sarana dan metode yang harus di pergunakan saat perang. Meskipun telah terdapat ketentuan tentang hukum humaniter, namun masih banyak korban yang berjatuhan saat perang, untuk itu diperlukan usaha untuk membedakan obyek sipil dan sasaran militer dalam suatu sengketa bersenjata. Menurut peraturan Den Haag, khususnya pada lampiran Konvensi Den Haag IV (1907) tentang hukum dan kebiasaan di darat yang dikenal sebagai peraturan Den Haag (Hague Regulations), terdapat suatu klausula yang terkenal dengan sebutan “*Martens Clause*”.<sup>34</sup>

Klausula ini menyatakan bahwa warga setempat dan para pihak yang perang (*belligerent*) yang tidak mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam *Hague Regulations (HR)*, maka mereka tetap berada di bawah perlindungan dan aturan-aturan prinsip hukum internasional yang di hasilkan dari kebiasaan yang tumbuh dalam suatu negara, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan klausula martens ini, dapat dipahami bahwa perlindungan penduduk sipil telah diakomodir. Disamping perlindungan yang telah ada dalam klausula martens, maka dapat pula kita lihat pasal-pasal lain yang terdapat dalam HR, yang telah menggambarkan usaha untuk membedakan obyek-obyek mana yang tidak boleh diserang.

---

<sup>34</sup> Martens Clause bab III

Selanjutnya dalam Pasal 23 poin (g) HR, “yang melarang menghancurkan harta benda musuh kecuali sangat diperlukan oleh kepentingan berperang”.

Sedangkan pasal 27 HR menyatakan bahwa

“semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit, tempat-tempat di mana mereka yang luka dan sakit dirawat; asalkan semua bangunan ini tidak dijadikan tujuan-tujuan militer”. Ketentuan tersebut secara eksplisit menyebutkan obyek-obyek apa saja yang tidak boleh di jadikan sasaran dalam peperangan.<sup>35</sup>

Di samping HR yang telah memberikan contoh tentang obyek apa saja yang tidak boleh diserang, maka terdapat pula ketentuan hukum lain yang memuat klausula serupa. Salah satunya adalah Konvensi Den Haag IX (1907) tentang Pengeboman yang di lakukan oleh angkatan laut. Pasal 1 berbunyi tentang:<sup>36</sup>

Pasal 1 ayat (1)

*“The bombardment by naval forces of undefended ports, towns, villages, dwellings, or building is forbidden”*

Pasal 1 ayat (2)

*“military works, military or naval establishment, depots of arms or war materiel, workshops or plants which could be utilized for the needs of hostile fleet or army, and the ships of war in the harbour, are not, however, included in this prohibition”*

Dari Pasal 1 diatas telah menjelaskan, pengeboman oleh angkatan laut yang tidak dapat dipertahankan di pelabuhan, perkotaan, pedesaan, tempat kediaman, atau bangunan adalah dilarang. Selanjutnya Pasal 2 bengkel militer,

---

<sup>35</sup> Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Paris, 1991, hlm 781

<sup>36</sup> Arlina Permatasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm.200

pabrik militer, atau karya militer yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan armada angkatan laut, serta kapal perang di pelabuhan, ataupun yang tidak termasuk dalam hal tersebut, tidak termasuk dalam larangan ini.

Hal diatas sebenarnya sudah menunjukkan adanya perbedaan obyek-obyek yang termasuk dalam sasaran militer atau bukan. Hanya saja pada Tahun 1907 belum ada sebutan mengenai obyek sipil atau sasaran militer, serta belum ada definisi yang tepat terkait hal tersebut.

Selain harus membedakan obyek sipil dan sasaran militer, adapula kewajiban negara dalam melindungi sejumlah tempat bersejarah untuk menjaga warisan dunia sesuai dengan peraturan yang ada dalam UNESCO, selain itu ada pula beberapa konvensi yang mengharuskan semua peserta perang untuk menghormati benda budaya yang ada di wilayah konflik. Kewajiban melindungi sebagai berikut:

### **C. Perlindungan Obyek Bersejarah**

Kewajiban suatu negara dalam menjadi peserta perang, salahsatunya yaitu bentuk kewajib untuk melindungi dan menghormati benda budaya, aset, dan property negara yang telah tercatat dalam UNESCO dan harus dijaga kelestariannya. Upaya untuk melindungi hal diatas telah termuat dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda - Benda Budaya pada saat Sengketa Bersenjata, seperti:

Pasal 19 (1) menyebutkan:<sup>37</sup>

*“In the Event of armed conflict not of an international character occurring within the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the provisions of the present Convention which relate to respect for cultural property.”*

Pasal 19 mengartikan sebagai berikut, pada saat sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi dalam teritori dari satu pihak Peserta Agung, maka setiap pihak yang bersengketa terikat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari konvensi ini, yang berhubungan dengan penghormatan benda budaya sebagai ketentuan minimum.

Konvensi ini mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk melindungi benda budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional. Konvensi ini membedakan perlindungan tersebut menjadi perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum antara lain yaitu dengan cara mendirikan bangunan khusus, dengan merencanakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman, atau dengan menandainya dengan tanda pelindung khusus.<sup>38</sup> Selanjutnya untuk perlindungan khusus telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 Pasal 8 menyebutkan:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Pasal 19 Konvensi Den Haag 1954

<sup>38</sup> Arlina Permatasari, op.cit, hlm.45

<sup>39</sup> Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954

*1. There are may be placed under special protection a limited number of refuges intended to shelter movable cultural property in the event of armed conflict, of centres containing monuments and other immovable cultural property of very great importance, provided that they:*

*(a) are situated at an adequate distance from any large industrial centre or from any important military objective constituting station, establishment engaged upon work of*

“(1) Terhadap sejumlah terbatas tempat penampungan yang dimaksudkan untuk menyimpan benda budaya bergerak pada saat sengketa bersenjata dapat ditempatkan di bawah perlindungan khusus, dan juga terhadap pusat-pusat yang berisi monumen-monumen dan benda budaya tak bergerak lainnya yang sangat penting, apabila mereka:

- a. Terletak pada suatu jarak yang memadai dari setiap pusat industri besar atau dari setiap objek militer penting yang merupakan suatu titik rawan, seperti misalnya, suatu aerodrome, stasiun siaran, perusahaan yang berkaitan dengan kerja pertahanan nasional, suatu pelabuhan, atau stasiun kereta api yang relatif penting atau suatu jaringan utama komunikasi
  - b. Tidak dijadikan untuk tujuan militer
- (4) Penjagaan benda budaya yang disebut dalam ayat (1) diatas oleh petugas bersenjata yang ditugaskan untuk itu, atau kehadiran petugas polisi yang sehari-harinya bertanggung jawab, untuk pemeliharaan ketertiban umum

---

*national defence, a port or railway station of relative importance or a main line of communication;*

*(b) are not used for military purposes.*

*2. A refuge for movable cultural property may also be placed under special protection, whatever its location, if it is so constructed that, in all probability, it will not be damaged by bombs.*

*3. A centre containing monumnets shall be deemed to be used for military purposes whenever it is used for the movement of military personnel or material, even in transit. The same shall apply whenever activities directly connected with military operations, the stationing of military personnel, or the production of war material are carried on within the centre.*

*4. The guarding of cultural property mentioned in paragraph 1 above by armed custodians specially empowered to do so, or the presence, in the vicinity of such cultural property, of police forces normally responsible for the maintenance of public order, shall not be deemed to be used for military purposes.*

*5. If any cultural property mentioned in paragraph 1 of the present Article is situated near an important military objective as defined in the said paragraph, it may nevertheless be placed under special protection if the high contracting party asking for that protection undertakes, in the event of armed conflict, to make no use of the objective and particularly, in that event, such diversion shall be prepared in time of peace.*

*6. Special protection is granted to cultural property by its entry in the "International Register of Cultural Property under Special Protection". This entry shall only be made, in accordance with the provisions of the present convention and under the conditions provided for in the Regulations for the execution of The Convention.*

disekitar benda budaya, seharusnya tidak dianggap digunakan untuk tujuan militer

- (5) Jika setiap benda budaya yang disebutkan dalam ayat (1) dari pasal ini terletak berdekatan dengan suatu objek militer yang penting sebagaimana ditetapkan dalam ayat tersebut, maka benda budaya tersebut bagaimanapun dapat ditempatkan dibawah perlindungan khusus jika pihak Peserta Agung yang meminta perlindungan tersebut itu berusaha, pada saat sengketa bersenjata, untuk tidak menjadikannya sebagai sasaran, dan khususnya untuk suatu pelabuhan, stasiun kereta api, atau aerodrome, untuk mengalihkan semua lalu lintas daripadanya. Dalam yang demikian maka hal tersebut, harus dipersiapkan pada waktu damai.
- (6) Perlindungan khusus diberikan pada benda budaya melalui pendaftarannya dalam “pendaftaran internasional atas benda budaya di bawah perlindungan khusus”. Pendaftaran ini hanya dapat dilakukan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan konvensi ini.”

Perlindungan khusus yang telah diatur dalam pasal 8 diatas merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan benda budaya yang ada disekitar wilayah konflik seperti aerodrome, stasiun siaran dan segala tempat penting yang perlindungannya telah diatur dan harus ditaati dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik.

Perlindungan selanjutnya adalah dengan menggunakan Lambang Pengenal seperti yang diatur dalam Bab V Konvensi Den Haag 1954 Pasal 16 menyatakan:



*“1. The distinctive emblem of the convention shall take the form of a shield, pointed below, per saltire blue and white (a shield consisting of a royal-blue square, one of the angles of which forms the point of the shield, and of a royal-blue triangle above the square, the space on either side being taken up by a white triangle)*

*2. The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation (one shield below), under the conditions provided for in article 17”*

Pasal 16 Konvensi Den Haag menjelaskan:

- 1) Lambang pengenalan dalam Konvensi ini berupa tameng yang mengarah kebawah dengan saltir biru dan putih (sebuah tameng yang terdiri dari suatu segi empat sama sisi biru yang salah satu sudutnya merupakan ujung dari tameng, dan sebuah segitiga sama sisi biru yang bagian atas; ruang disisi kiri dan kanannya terdiri dari masing-masing sebuah segitiga warna putih)
- 2) Lambang harus digunakan sebuah, atau digunakan tiga buah dalam formasi segitiga (satu tameng di bawah), menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 17)

Penggunaan tanda pengenalan diatas juga merupakan upaya untuk melindungi tempat bersejarah dengan memasangnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 dan dilanjutkan dengan Pasal 17 yang juga menguraikan alat identifikasi dari benda budaya apa saja yang harus dilindungi pada saat terjadi perang.

Pasal 17, menjelaskan:

- 1) Tanda Pengenal yang digunakan tiga buah sebagai alat identifikasi dari:
  - a) Benda budaya tak bergerak yang berada di bawah perlindungan khusus;



b) Pengangkutan benda budaya menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 12-13;

c) Tempat penampungan sementara, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan untuk pelaksanaan Konvensi.

2) Lambang pengenalan yang digunakan satu buah digunakan sebagai alat identifikasi dari:

a) Benda budaya yang tidak di bawah perlindungan khusus;

b) Orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Konvensi;

c) Personil yang terlibat dalam tugas perlindungan benda budaya;

d) Kartu-kartu identitas yang disebut dalam peraturan-peraturan pelaksanaan Konvensi.

Lalu diatur pula mengenai obyek sipil apa saja yang harus dilindungi seperti pada Pasal 52 Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional menguraikan obyek sipil yang harus dilindungi, sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan. Obyek-obyek sipil adalah semua Obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat 2.
2. Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak-tempatnya, tujuannya

---

<sup>40</sup> Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, pasal 52

atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang ada pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.

3. Apabila diragukan apakah suatu obyek yang biasanya diabadikan pada tujuan-tujuan sipil, seperti tempat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka obyek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya Saat Terjadi Konflik Bersenjata diatur dalam pasal 28, dimana:

*“The High Contracting Parties Undertake to take, within the framework of their ordinary criminal jurisdiction, all necessary steps to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions upon those persons, of whatever nationality, who commit or order to be committed a breach of the present Convention”*

Dalam pasal 28 tersebut mengartikan, setiap negara peserta berusaha mengambil langkah sendiri untuk menghukum dan memberikan sanksi pidana ataupun sanksi disiplin kepada orang-orang yang melanggar atau memerintahkan untuk dilanggarnya ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954. Oleh karena itu, perihal sanksi pelanggaran ketentuan Konvensi Den Haag 1954 diatur oleh hukum nasional menurut pasal 28.

Akan tetapi dalam Protokol Tambahan 1977, mengatur lebih lanjut sanksi pelanggaran tersebut dalam pasal 53 Protokol Tambahan 1977 yang

meneruskan rumusan Perlindungan bagi Obyek-Obyek Kebudayaan dan Tempat Pemujaan, sebagai berikut:

*“Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of armed Conflict, and of other relevant international instruments, it is prohibited:*

- (a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;*
- (b) to use such objects in support of the military effort;*
- (c) to make such the object of reprisals.”*

Dimana ketentuan diatas memiliki arti sebagai berikut:

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Den Haag Tentang Perlindungan Harta Benda Kebudayaan, jika terjadi pertikaian bersenjata dan dari Piagam-piagam Internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu adalah dilarang:

- a. Melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan kebudayaan atau spiritual dari suatu bangsa;
- b. Menggunakan obyek-obyek seperti itu untuk menunjang usaha militer;
- c. Menjadikan obyek-obyek seperti itu sebagai obyek pembalasan.

Ketentuan diatas merupakan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan benda budaya yang dengan cara apapun tidak menghalangi keberlakuan segala instrumen internasional lain terkait perlindungan benda budaya.

## **2. Tanggung Jawab Peserta Perang Terhadap Rusaknya Tempat Bersejarah dan Benda Budaya di Aleppo**

Tanggung jawab berarti kewajiban memberikan pemulihan atas terjadinya kerugian yang di timbulkan atas terjadinya kerusakan oleh negara tersebut ke negara lain.<sup>41</sup> Berikut 3 karakteristik yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yaitu:

- a) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional
- c) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Dari ketiga karakteristik, dapat kita ketahui bahwa peserta perang telah melanggar semua ketentuan yang ada. Dimana peserta perang lalai akan perbuatannya, merusak dan menimbulkan kerugian, serta tidak mematuhi kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut. Maka akibat kelalaian yang telah merugikan, negara wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

### **A. Kewajiban Negara dalam Melindungi Tempat Bersejarah**

Kewajiban negara meliputi 3 macam:

---

<sup>41</sup> Opcit, F. Sugeng Istanto, hlm. 105

- a) Kewajiban untuk menghormati (*to respect*), dimana kewajiban untuk menghormati meliputi kewajiban untuk tidak mencampuri penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut untuk mensyaratkan negara agar menahan diri baik langsung maupun tidak langsung dari penikmatan semua kebebasan hak asasi dari individu (baik sendiri maupun dalam hubungan sesama) untuk memuaskan kebutuhan dasar atau menikmati hak-hak tertentu.
- b) Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dalam hal ini pemenuhan hak asasi manusia mensyaratkan pada negara yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah positif guna menjamin bahwa hak asasi manusia telah dilindungi, tidak hanya menjaga agar tidak menjaga agar tidak mengganggu hak asasi manusia atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak lain mengganggu penikmatan HAM.
- c) Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yaitu, mensyaratkan negara untuk menetapkan kebijakan yang mengatur tindakan dan sikap dari individu, kelompok, atau entitas yang mempunyai akibat terhadap penikmatan hak asasi manusia.

Dari ketiga macam kewajiban negara diatas, telah jelas bahwa negara harus menghormati dan melindungi segala macam yang berpengaruh terhadap hak asasi manusia dan juga mencakup terhadap sarana publik yang menjadi identitas suatu negara.

### 2.A.1 Kewajiban Negara dalam Menghormati Tempat Bersejarah

Dalam pasal 4 Konvensi Den Haag 1954 yang berisi 4 bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang harus dipatuhi oleh peserta perang.<sup>42</sup> Keempat bentuk penghormatan tersebut merupakan larangan untuk tidak menggunakan benda budaya dan wilayah sekitarnya untuk tujuan yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan; keharusan untuk tidak melakukan segala tindakan permusuhan (*act of hostility*) terhadap benda budaya; kewajiban untuk mencegah, melarang, dan menghentikan pencurian, penjarahan, misapropriasi dari, dan vandalisme terhadap benda budaya; dan tidak menjadikan benda budaya sebagai obyek dari tindakan pembalasan (*reprisal*).

Penghormatan yang pertama, yaitu suatu keharusan agar tidak menggunakan benda budaya dan wilayah sekitarnya untuk tujuan yang

---

<sup>42</sup> Pasal 4 Konvensi Den Haag 1954

1. *The high Contracting Parties undertake to respect of cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other high contracting parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility, directed against such property.*
2. *The obligations mentioned in paragraph 1 of the present article may be waived only in cases where military necessity imperatively requires such a waiver*
3. *The high contracting parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put stop to any from the theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another high contracting party.*
4. *They shall refrain from any directed by way of reprisals against cultural property.*



mungkin menimbulkan kehancuran atau kerusakan terhadap benda budaya sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Konvensi Den Haag 1954. Yang termasuk dalam tindakan pelanggaran adalah penggunaan benda budaya secara pasif atau tidak langsung yang mungkin akan mengakibatkan benda budaya tersebut diserang. Contohnya seperti bersembunyi dibalik benda budaya, yang sehingga membuat musuh terhalangi oleh suatu benda maka akan ada kemungkinan benda budaya tersebut diserang.<sup>43</sup>

Larangan penggunaan benda budaya untuk tujuan yang dapat membahayakan tidak hanya berlaku pada saat terjadi konflik akan tetapi juga ketentuan tersebut juga berlaku pada saat damai. Selanjutnya bentuk penghormatan yang kedua berdasar pasal 4 Konvensi Den Haag yaitu keharusan untuk tidak melakukan segala tindakan permusuhan terhadap benda budaya (*any act of hostility*) penggunaan istilah tersebut bukan hanya berarti larangan serangan, akan tetapi juga larangan tindakan penghancuran dengan menggunakan bahan peledak atau mesin penggusur.<sup>44</sup>

Kedua bentuk penghormatan diatas, terdapat satu pengecualian kewajiban negara peserta terkait dengan kepentingan militer yang imperatif (*imperative military necessary*) dimana prinsip tersebut merupakan kepentingan militer yang imperatif yang hanya dapat diberlakukan jika diatur secara tegas dalam hukum tertulis. Sebagai konsekuensi dari pengecualian yang tegas itu, terkait dengan penghormatan terhadap benda budaya yang pertama, apabila dilihat

---

<sup>43</sup> Karl Joseph Patrigh, "*Protection of Cultural Property*" dalam *The handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, ed.1, Oxford University Press, hlm. 385

<sup>44</sup> Ibid.,



dari sudut pandang militer adalah keharusan yang imperatif untuk menggunakan benda budaya yang menjadi tidak dilarang. Akan tetapi perlu diingat bahwa keadaan dimana penggunaan benda budaya untuk tujuan militer tersebut sangatlah jarang terjadi pada saat konflik.

Bentuk penghormatan ketiga, dalam pasal ini mengharuskan negara peserta untuk menghentikan, mencegah, dan jika perlu menghentikan pencurian, penjarahan, misapropriasi dari, dan vandalisme terhadap benda budaya. Kewajiban ini berlaku untuk semua peserta perang tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata.

Bentuk penghormatan yang terakhir, melarang dijadikannya benda budaya sebagai sasaran pembalasan (*reprisal*). Ketentuan ini adalah absolut dan alasan kepentingan militer yang imperatif tidak dapat digunakan.<sup>45</sup>

### **2.A.2 Kewajiban Negara dalam Mengamankan Kekayaan Budaya**

Konvensi Den Haag 1954 secara tegas tidak mengatur penjelasan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengamankan benda budaya pada saat damai, akan tetapi Protokol Tambahan 2 1999 memberikan contoh beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Misalnya dalam pasal 5 Protokol Tambahan II 1999:

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 388

*“Preparatory measures taken in time of peace for the safeguarding of cultural property against the foreseeable effects of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection against fire or structural collapse, the preparation for the removal of movable cultural property or the provision for adequate in situ protection of such property, and the designation of competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property”*

Pasal diatas berbunyi, langkah-langkah persiapan yang dapat diambil dalam waktu damai, untuk melindungi kekayaan budaya atas efek masa konflik bersenjata sesuai dengan Pasal 3, sesuai dengan, persiapan persediaan, perencanaan tindakan darurat untuk perlindungan terhadap kebakaran atau struktur runtuh, persiapan untuk penghapusan kekayaan budaya atau penyediaan untuk perlindungan di situ yang memadai properti tersebut, dan penunjukan yang akan bertanggung jawab untuk melindungi kekayaan budaya.

Sedangkan ketentuan dari pasal 3 sendiri yaitu

*“The high Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate.”*

Pihak peserta agung melakukan persiapan dalam waktu damai untuk melindungi kekayaan budaya yang terletak di dalam wilayah mereka sendiri terhadap efek masa konflik bersenjata, dengan mengambil tindakan-tindakan seperti yang mereka anggap tepat. Dari kedua ketentuan diatas, maka pasal 5 Protokol Tambahan II 1999 lebih membantu para pihak peserta dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan kekayaan budaya mereka yang salah satunya tempat bersejarah seperti Kota tua Aleppo yang memiliki banyak bangunan bersejarah yang tercatat dalam UNESCO.

### 2.A.3 Kewajiban Kelompok Bersenjata non-Negara Terhadap Warisan Budaya

Beberapa pasal dalam konvensi ini secara khusus menyebutkan bahwa keberlakuan seluruh isi pasal tersebut berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non Internasional. Hal ini tentu saja berarti bahwa secara sebagian dari pasal tersebut ditujukan untuk satu kelompok bersenjata non negara, karena konflik bersenjata non Internasional melibatkan negara dan kelompok bersenjata non negara atau beberapa kelompok bersenjata.

Sesuai dengan Pasal 19 (1) Konvensi Den Haag<sup>46</sup> yang arti pentingnya adalah bahwa hal ini tidak mempengaruhi status hukum para pihak, yang berarti bahwa kelompok bersenjata non negara tetap merupakan aktor non negara bahkan jika hal itu terikat oleh kewajiban yang sama sekaligus dengan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini yang bersangkutan adalah kelompok bersenjata non negara yang berkonflik dengan kelompok bersenjata negaranya sendiri.<sup>47</sup>

Selanjutnya Protokol Tambahan II juga mengatur konflik bersenjata non internasional seperti yang diatur dalam pasal 1:

*“1. This protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949, and relating to the Protections of Victims of International Armed Conflicts and which take place in the territory of a high contracting Parties between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its*

---

<sup>46</sup> Pasal 19, Ibid.

<sup>47</sup> <http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/irl.2015.3> diakses pada tanggal 16 April

*territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this protocol.”*

Pasal diatas mengartikan protokol ini, mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasan terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan protokol ini.

Dengan demikian Protokol Tambahan II tidak berlaku untuk konflik bersenjata internal yang hanya melibatkan kelompok bersenjata non negara, akan tetapi juga harus melibatkan negara dalam konflik yang di permasalahan. Oleh karena itu penerapannya lebih terbatas daripada Konvensi Den Haag dan Protokol Kedua karena berlaku untuk kelompok bersenjata non negara saja. Selanjutnya dalam sebuah konflik bersenjata non negara, jelas terikat pada ketentuan yang berkaitan dengan penghormatan warisan budaya, selama mereka mengambil bagian dalam konflik bersenjata yang melibatkan sebuah negara maka harus mematuhi peraturan yang telah diatur secara jelas dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahan II 1977 terkait dengan konflik bersenjata non internasional.

## 2.A.4 Kewajiban Negara untuk Mencegah Kerusakan

Aturan terhadap penyerangan terhadap benda budaya diatur dalam aturan 38 dalam laporan ICRC mengenai hukum kebiasaan untuk Hukum Humaniter.

Aturan tersebut berbunyi:

*“a. Special care must be taken in military operations to avoid damaged to buildings dedicated to religion, art, science, education or charitable purposes and historic monuments unless they are military objectives”*

Peraturan diatas mengatur tentang perhatian khusus yang harus diambil dalam operasi militer untuk menghindari kerusakan benagunan-bangunan yang didedikasikan untuk agama, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan atau tujuan amal dan monumen bersejarah kecuali tujuan militer mereka. Aturan tersebut berkaitan dengan prinsip kehatian-hatian dalam hukum internasional. Telah menjadi suatu kebiasaan hukum internasional dalam membedakan antara obyek sipil dan sasaran militer seperti yang telah duraikan diatas.

Berdasarkan ketentuan ini, negara wajib mengakui adanya keharusan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap benda budaya dalam hal melakukan operasi militer pada masa konflik bersenjata dengan tujuan menghindari kerusakan terhadap benda budaya yang antara lain monumen bersejarah. Kewajiban ini telah menjadi panduan militer berbagai negara.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Kanada, *Law of Armed Conflict Manual (1999)*, Republik Dominika, Military Manual, hlm 4.

## **B. Peserta Perang Negara dan Peserta Perang Bukan Negara (*Armed Conflict State and Armed Conflict Non-State*)**

Sengketa bersenjata internasional adalah perang yang terjadi dimana semua pesertanya adalah negara, dimana sebelumnya ada pernyataan perang meskipun pernyataan tersebut tidak diakui oleh pihak lawan. Sebab istilah sengketa bersenjata berguna untuk mengurangi argumentasi bagi negara yang ingin menolak pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dengan alasan tindakan yang dilakukan belum termasuk dalam tindakan perang.<sup>49</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan mengenai sengketa bersenjata internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa, sudah seharusnya untuk melakukan pembenahan. Maka selanjutnya hal tersebut disusun dalam Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Bersenjata Internasional

Pasal 1 ayat (4):

*“The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self determination, as enshrined in the charter of the United Nations and the Declaration on Principle of International Law concerning Friendly Relations and co-operation among States in accordance with the charter of the United Nations.”*

Situasi yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya termasuk konflik bersenjata di mana orang berjuang melawan dominasi kolonial dan penduduk asing dan rezim rasis dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi pada prinsip-prinsip

---

<sup>49</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 57



hukum internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB.

Dalam pasal ini, upaya untuk konflik bersenjata melawan bangsa kolonial, orang asing, dan rezim rasis, dalam hal penentuan nasib sendiri, telah dijamin oleh Piagam PBB dan dalam Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional mengenai kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB.

Dalam hal perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non internasional terlihat pada status hukum para pihak yang bersengketa. Sengketa bersenjata non internasional, yaitu para pihak yang bersengketa adalah negara dengan bukan negara, sengketa tersebut dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana pertempuran terjadi antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir dalam wilayah suatu negara. Dalam hal perang yang terjadi di Aleppo, perang tersebut merupakan sengketa bersenjata non internasional, karena perangnya terjadi antara angkatan bersenjata milik pemerintah dengan rasis rezim yang kontra terhadap pemerintahan saat itu.

Meski perang yang terjadi merupakan sengketa bersenjata non internasional atau bukan negara. Ketentuan mengenai kewajiban melindungi aset dan properti harus tetap dilaksanakan seperti yang sudah diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 maupun Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.



### C. Tanggung Jawab Peserta Perang

Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan perjanjian, perlindungan kekayaan budaya apabila terjadi konflik bersenjata ataupun kerusakan terhadap warisan budaya yang merugikan suatu negara. Atau bahkan apabila warisan budaya tersebut menjadi identitas suatu bangsa. Maka sesuai dengan isi dari Protokol Tambahan I pada Pasal 87 menyatakan:

*“1. The high Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require military commanders, with respect to members of the armed forces under their command and other persons under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and to report to competent authorities breaches of the Conventions and of this Protocol.*

*2. In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders ensure that members of the armed forces under command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol*

*3. The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any commander who is aware that subordinates or other persons under his control are going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violations thereof.”*

Pemahaman terkait pasal 87 diatas menerangkan tentang tanggung jawab komandan seperti:

1. Pihak peserta agung yang berada dalam konflik akan memerlukan komandan militer, yang bertugas terhadap anggota tentara dibawah mereka dan orang lain di bawah kendali mereka, untuk mencegah dan, jika perlu, untuk menekan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan pelanggaran konvensi dan protokol ini.
2. Dalam rangka untuk mencegah dan menekan pelanggaran, pihak Agung yang berjanji dan semua pihak dalam konflik, mereka bertanggung jawab

atas hal itu, komandan memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata di bawah komando mereka menyadari kewajiban di bawah konvensi dan protokol ini.

3. Pihak Peserta Agung yang berjanji akan memerlukan setiap komandan yang menyadari bahwa bawahan atau orang lain di bawah kekuasaannya akan melakukan atau telah melakukan pelanggaran dari konvensi atau protokol ini, untuk mencegah pelanggaran seperti konvensi atau protokol ini, dan, jika sesuai, untuk memulai tindakan disipliner atau pidana terhadap pelanggar daripadanya.

Tugas para komandan adalah untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter. Dan apabila terjadi pelanggaran, komandan wajib mengambil tindakan dengan menghukum atau melaporkan orang yang salah kepada instansi yang berwenang. Komandan dalam pernyataan tersebut berarti sangat luas, sehingga mencakup setiap militer yang memerintah sejumlah bawahan, atau bahkan pemberontak yang juga menjadi ketua dari kelompok tersebut. Dengan demikian, penanggung jawab atas penerapan Hukum Humaniter di lingkungan angkatan bersenjata terletak pada komandan perang.<sup>50</sup>

Pada Pasal 38 Protokol Tambahan II 1999:

*“No provision in this Protocol relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of the States under international Law, including the duty to provide reparation.”*

Arti dari penjelasan diatas adalah terdapat ketentuan dalam protokol ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual yang akan

---

<sup>50</sup> Arlina Permatasari, op.cit, hlm. 274

memengaruhi tanggung jawab negara-negara di bawah hukum internasional, termasuk kewajiban untuk memberikan reparasi.

Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 28 Konvensi Den Haag 1954, Pasal 87 Protokol Tambahan I 1977, serta Pasal 38 Protokol Tambahan 1999 semua pelanggaran yang terjadi akibat tindakan konflik bersenjata komandan wajib mengambil tindakan yaitu dengan menjatuhkan sanksi disiplin untuk para pelaku tindakan pelanggaran.

Pasal 28 Konvensi Den Haag 1954 tidak terlalu tegas dalam memberikan sanksi terhadap perlindungan benda budaya. Oleh karena itu di perbaharui dengan adanya Protokol Tambahan II 1999 dimana negara memiliki dua kewajiban yang berbeda terkait pemberian sanksi. Yang pertama pelanggaran serius, dan yang kedua pelanggaran-pelanggaran lain. Pelanggaran serius memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjadikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan hukum nasionalnya dan membuat pelaku dijatuhi sanksi.

Pelanggaran serius ini terdiri dari 5 tindakan, yang dimana kedua pelanggaran serius tersebut membuat benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan sebagai obyek penyerangan atau wilayah sekitarnya untuk mendukung tindakan militer.<sup>51</sup> Tiga pelanggaran serius lainnya adalah mengakibatkan kehancuran yang ekstensif terhadap benda budaya, menjadikan

---

<sup>51</sup> Pasal 15 (1) a dan Pasal 15 (1) b dalam Protokol Tambahan II 1999

benda budaya tersebut sebagai obyek penyerangan, pencurian, penjarahan atau misapropriasi dari, atau vandalisme terhadap benda budaya.<sup>52</sup>

Untuk pelanggaran lain, Protokol Tambahan II 1999 mengharuskan negara peserta untuk meratifikasi legalisasi, instrumen hukum, ataupun langkah-langkah lain yang menekan pelanggaran-pelanggaran selain kelima pelanggaran serius diatas yang dilakukan dengan sengaja. Terhadap pelanggaran yang serius negara wajib menjadikan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana.

Selain diatur dalam beberapa pasal yang ada di dalam Konvensi Den Haag 1954 maupun Protokol Tambahan I ataupun II tentang Konvensi Den Haag, pertanggung jawaban peserta perang apabila terdapat kerusakan tempat bersejarah juga diatur dalam Statuta *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* atau biasa disingkat ICTY

### **2.C.1 Statuta ICTY Terkait dengan Aturan Benda Budaya**

ICTY mengatur tentang yurisdiksi atas serangkaian kejahatan yang dibahas secara umum, yang mana isinya secara spesifik dapat ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional.

Agar pelaku suatu penyerangan terhadap benda budaya dapat dijatuhi sanksi, penyerangan yang dilakukan harus benar-benar harus mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap suatu properti yang dianggap sebagai warisan budaya dunia. Aspek tersebut merupakan elemen pertama dalam dua aspek

---

<sup>52</sup> Ibid, Pasal 15 (1) c, 15 (1) d, 15 (1) e.

pembuktian perusakan. Aspek yang kedua meliputi suatu kerusakan yang merupakan warisan budaya atau spriritual masyarakat.<sup>53</sup> Pembuktian tersebut dapat ditemui dalam Pasal 3(d) statuta ICTY yang menjelaskan:

*“As for the mens rea element for this crime, the chamber is guided by the previous jurisprudence of the Tribunal that a preparator must act with a direct intent to damage or destroy the property in question”*

Adapun beberapa elemen mens rea untuk kejahatan ini, dipandu oleh yurisprudensi sebelum preparasi majelis yang harus bertindak dengan niat untuk merusak atau menghancurkan harta kebudayaan.

### 2.C.2 Pemberian Sanksi Menurut Statuta ICTY

Sanksi pidana yang salah satunya dalam bentuk penjara merupakan satu-satunya bentuk penalti yang dapat diberikan kepada pelaku yang terbukti bersalah dalam persidangan.<sup>54</sup> Hukuman penjara sendiri merupakan satu-satunya bentuk hukuman yang pantas atas kejahatan perang; denda, jika ditanggung sendiri bukan merupakan hukuman yang pantas, namun dapat menjadi tambahan dari hukuman penjara. Khusus dalam konteks penghancuran benda budaya, ICTY mempunyai pandangan lain bahwa hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

*“this crime (of destruction or wilful damage done to instructions dedicated to religion, charity, education, and the arts and sciences, and to historic monuments and works of arts and sciences) represents a violation of values especially protected by the international community”*<sup>55</sup>

Kejahatan (penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap yang disengaja terhadap institusi yang didedikasikan kepada agama, amal, ilmu

<sup>53</sup> *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Judgement, Trial Chamber para. 185

<sup>54</sup> Statuta ICTY Pasal 24 (1)

<sup>55</sup> Trial Chamber, op, cit. Para. 51

pengetahuan, seni, dan monumen bersejarah) mewakili pelanggaran terhadap nilai-nilai yang secara khusus dilindungi oleh komunitas internasional.

ICTY juga mempertimbangkan:

*“Restoration of buildings if this kind, when possible, can never return the buildings to their state prior to the attack because a certain amount of original, historically authentic, material will have been destroyed, thus affecting the inherent value of the buildings.”<sup>56</sup>*

Restorasi dari bangunan-bangunan jenis ini, saat memungkinkan, tidak akan pernah mengembalikan bangunan-bangunan tersebut kedalam keadaan semula sebelum terjadinya penyerangan karena jumlah tertentu dari material asli yang secara sejarah otentik telah hancur, dan karenanya mempengaruhi nilai inheren dari bangunan-bangunan tersebut.

Jadi, sebagai faktor-faktor dalam penentuan hukuman terhadap kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY adalah kejahatan yang melanggar nilai-nilai yang dilindungi oleh komunitas internasional dan fakta bahwa restorasi terhadap benda budaya tidak akan mengembalikan nilai benda tersebut ke seperti semula sebelum terjadinya kerusakan.

ICTY menerapkan pertanggungjawaban pidana individual terhadap para pelaku. Pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam pasal 7 (1) dan (3) yang mengatur mengenai pertanggungjawaban sekunder seseorang sebagai komando dari orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan (*command responsibility*).

Pasal 7 (1) Statuta ICTY:

*“A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to*

---

<sup>56</sup> Trial Chamber, Ibid. Para. 52



*in article 2 to 5 of the present Statue, shall be individually responsible for the crime”*

Maksud dari pasal diatas adalah orang yang berencana, menghasut, memerintahkan, dan berkomitmen atau sebaliknya dibantu dalam hal perencanaan, persiapan atau pelaksanaan kejahatan disebut dalam pasal 2-5 turut serta, dan akan bertanggung jawab secara individu untuk kejahatan.

Sedangkan Pasal 7 (3) Statuta ICTY:

*“The fact that any of the acts referred to in articles 2-5 of the present statue was committed by a subordinated does not relive his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevents such acts or to punish the perpetrators thereof”*

Salah satu tindakan yang dirujuk dalam artikel 2-5 sekarang dilakukan oleh, apakah subordinasi atau tidak, hal itu membuat sang komando bertanggungjawab pidana. Jika ia mempunyai alasan untuk tahu bahwa tindakan tersebut bertindak melakukan hal tersebut. Juga apabila komando gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan dan masuk akal untuk mencegah tindakan serangan atau menghukum para pelaku.

Pasal diatas merupakan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersifat sekunder, yaitu pertanggungjawaban tersebut membutuhkan suatu tes yang terdiri dari 3 bagian:

*“a. The existence of a superior-subordinate relationship  
b. the superior knew or had reason to know that the criminal act was about to be or had been committed; and  
c. the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent the criminal act or punish the perpetrator thereof”<sup>57</sup>*

Bagian pertama dapat diartikan adanya hubungan atasan-bawahan; atasan yang bersangkutan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa

---

<sup>57</sup> Statuta ICTY Appeals Chamber para. 839



suatu tindakan pidana akan dilakukan atau telah dilakukan; dan yang ketiga atasan yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindakan pidana atau munghukum pelakunya.

Mengenai bagian pertama dari tes diatas, basis dari hubungan atasan-bawahan adalah kekuatan yang dimiliki oleh atasan untuk mengendalikan anakbuahnya. Bagian kedua dari tes pertanggung jawaban sebagai atasan berurusan dengan elemen dari atasan itu sendiri. terkait hal ini paling tidak harus dibuktikan bahwa seseorang atasan memiliki informasi yang menyebabkan kejahatan. Untuk bagian yang ketiga, seorang atasan mengetahui alasan tindakan kejahatan yang dilakukan bawahannya dalam hal ini adalah perusakan.

### **2.C.3 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2199**

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menegaskan kembali terkait tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, sesuai dengan piagam PBB. Dalam Poin 15 DK PBB mengutuk penghancuran warisan budaya di Irak dan Suriah dimana salah satunya terletak di kota tua terbesar di Suriah yaitu Aleppo, oleh ISL dan Anf, baik kerusakan insidental atau disengaja, termasuk kehancuran bertarget situs keagamaan dan benda-benda.

Selanjutnya dalam Poin 17, keputusan dalam ayat 7 resolusi 1483 menegaskan kembali, dan memutuskan bahwa semua negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah perdagangan Irak dan

Suriah terkait kekayaan budaya dan item lainnya dari arkeologi, sejarah, budaya, langka ilmiah, dan penting agama secara ilegal dihapus dari Irak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Rusaknya situs bersejarah yang terjadi di Aleppo seperti Masjid Agung Aleppo, Al Madina Souq, dan The Citadel telah dijelaskan pada Pasal 19 (1) bahwa pada saat sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi dalam teritori maka setiap pihak yang bersengketa terikat wajib memberikan penghormatan benda budaya sebagai ketentuan minimum. Selanjutnya untuk perlindungannya dijelaskan pada Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954, yaitu dengan:
  - a) Penjagaan benda budaya dilakukan oleh petugas berwenang
  - b) Lokasi konflik agar berjauhan dengan pusat industri besar, seperti aerodrome, stasiun siaran, perusahaan yang berkaitan dengan pertahanan nasional, pelabuhan, atau stasiun kereta api yang masih aktif.
  - c) Perlindungan khusus juga dapat diberikan apabila telah mendaftarkan dalam “pendaftaran internasional atas benda budaya di bawah perlindungan khusus”. Pendaftaran tersebut dicatatkan dalam UNESCO
2. Tanggung jawab peserta dalam insiden rusaknya situs bersejarah yang terjadi di Aleppo, yang dapat dilakukan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954. Dalam Pasal 38 Protokol Tambahan II 1999 telah secara tegas mengatur tentang

pertanggungjawaban apa yang pantas dilakukan oleh oknum yang merusak yaitu dengan tanggung jawab secara pidana individual yang akan mempengaruhi tanggung jawab negara-negara di bawah hukum internasional, dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan reparasi.

## **B. SARAN**

1. Perlu dilakukannya perlindungan terhadap tempat bersejarah dan benda budaya setiap saat, dengan cara melakukan pengidentifikasian, pendataan dan pemeliharaan oleh lembaga-lembaga pemerintah setempat agar warisan tersebut dapat menjadi suatu entitas dari negara tersebut.
2. Diharapkan adanya aturan yang lebih spesifik dari Hukum Internasional, dikarenakan sanksi yang telah diatur kurang jelas mengatur tindakan yang seperti apa yang dapat di berikan terhadap peserta perang yang terbukti melakukan kerusakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Anne Sophie Gindorz, 1996, **Sejarah dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional**, PSHH – Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Cipayang.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, 2013, **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permatasari, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, ICRC, Jakarta.
- Denny Ramdhany, 2015, **Konteks Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dina Y Sulaeman, 2013, **Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional**, IMan, Depok
- F. Sugeng Istanto, 2010, **Hukum Internasional**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Frits Kalshoven, 1991, *Constraint on The Wagging of War*, ICRC, Geneva.
- Haryotaram, 1994, **Sekelumit Tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Haryomataram, 1984, **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta.
- Hans Peter Gaser, 1993, *Internasional Humanitarian Law*, Paul Haupt Publisher, Vienna.
- Huala Adolf, 2011, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Kencana Media, Bandung.
- Hingorani, 1984, *Modern International Law*, 2nded, London.
- I Wayan Parthiana, 2005, **Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2**, Mandar Maju, Bandung.
- International Committee of Red Cross, 2004, *What is International Humanitarian Law?*, International Committee of Red Cross Legal Fact Sheet, German.

Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Publisher, German.

Kanada, 1980, *Law of Armed Conflict Manual (1999)*, Republik Dominika, Military Manual, German.

Karl Joseph Patrich, 1995, "*Protection of Cultural Property*" dalam *The handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford University Press, Oxford.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Masjhur Effendi, Moh Ridwan dan Muslich Subandi, 1995, *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*, IKIP Malang, Malang.

Mohammed Bedjaoui, 1991, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Paris.

Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Oscar White Muscarella, 2013, *Archaeology, Artifacts and Antiquities of the Ancient Near East*, Brill, Leiden.

Patrick J Boylan, 2000, *The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict*, Routledge, London.

Rober Kolb, dan Richard Hyde, 2008, *An Introduction to the International Armed Conflict Law*, Hart Publishing, Portland.

Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar: edisi kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

## JURNAL

A Muchaddam Fahham dan A. M Kartaatmaja, Jurnal, *Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya*, Politica Vol. 5, 2014, hlm. 40

Marlina Lostal, Jurnal, *Syria World Cultural Heritage and Individual Criminal Responsibility*, International Review of Law, 2015, hlm. 5

## **INTERNET**

<https://m.kiblat.net/2016/05/02/10-situs-bersejarah-suriah-yang-hancur-akibat-konflik>, diakses tanggal 27 Desember 2017

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

<http://whc.unesco.org/en/list/21>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018

<http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/irl.2015.3> diakses pada tanggal 16 April 2018

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Konvensi Den Haag 1954

Martens Clause bab III

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan II 1999

Statuta ICTY Chamber 3

